

## INTEGRASI *BLUE ACCOUNTING* DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR UNTUK Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ariyani<sup>1</sup>; Nila Sari<sup>2</sup>; Defriani Fari Dewi<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Narotama, Surabaya<sup>1,2,3</sup>

Email : ariyani@narotama.ac.id<sup>1</sup>; nila.sari@narotama.ac.id<sup>2</sup>; defrifari@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan *blue accounting* sebagai pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Studi dilakukan di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan dan tambak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui kajian literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *blue accounting* masih berada pada tahap awal, masyarakat telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan pesisir, tetapi pencatatan usaha masih sederhana dan belum sistematis. Hambatan utama meliputi rendahnya budaya pencatatan, keterbatasan pelatihan, serta minimnya dukungan pemerintah. Simpulan penelitian mengaskan bahwa *blue accounting* berpotensi memperkuat transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan pengelolaan pesisir, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan, regulasi yang lebih kuat, dan penyediaan fasilitas pendukung.

Kata Kunci : *Blue Accounting*; Pengelolaan Wilayah Pesisir

### ABSTRACT

*The main objective of this study is to analyse the implementation of Blue Accounting as a coastal management approach that integrates economic, social, and environmental aspects to support sustainable development. The study was conducted in Kalanganyar Village, Sedati District, Sidoarjo Regency, where the majority of the community is engaged in fisheries and aquaculture. The method employed is descriptive qualitative through literature review and interviews with stakeholders. The findings reveal that the implementation of Blue Accounting is still at an early stage; the community has developed awareness of the importance of coastal management, yet business record-keeping remains simple and unsystematic. The main challenges include a weak culture of documentation, limited training, and insufficient government support. The study concludes that Blue Accounting has the potential to strengthen transparency, participation, and sustainability in coastal management; therefore, continuous training, stronger regulations, and adequate supporting facilities are required.*

Keywords : *Blue Accounting*; Coastal Management

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia, memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelestarian lingkungan global. Dengan garis pantai lebih dari 81.000 kilometer dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Napitupulu et al., 2022).

Kajian literatur terkini menunjukkan bahwa konsep *Blue Economy* yang diusung oleh Bank Dunia dan berbagai organisasi internasional menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan inklusif (UN, 2017). Implementasi *blue accounting* sebagai inovasi akuntansi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi pendekatan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir (Rahmayanti & Sari, 2022). Penelitian-penelitian sebelumnya pada pengelolaan wilayah pesisir di berbagai daerah telah menyoroti tantangan dalam pencatatan usaha tambak dan perlunya keterlibatan masyarakat secara partisipatif, namun belum banyak yang secara holistik mengkaji integrasi *blue accounting* dalam konteks desa pesisir luas seperti Desa Kalanganyar (Areia et al., 2023; Arumugam et al., 2023; Choeronawati et al., 2019; Ottinger et al., 2018).

Kesenjangan riset ini muncul pada aspek pentingnya evaluasi penerapan *Blue Accounting* secara komprehensif yang mencakup aspek teknis pencatatan, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi implementasi serta tantangan dan peluang *Blue Accounting* di desa pesisir terluas di Kecamatan Sedati, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana integrasi *Blue Accounting* dapat diterapkan dalam pengelolaan wilayah pesisir Desa Kalanganyar, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

*Blue Accounting* merupakan konsep yang dikembangkan dari *environmental accounting* dan *natural capital accounting* yang secara khusus berfokus pada sumber daya dan ekosistem laut serta wilayah pesisir. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks negara maju atau kawasan industri pesisir di negara berkembang. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa penerapan *Blue Accounting* yang didukung oleh pelatihan, sosialisasi, serta kebijakan yang tepat akan meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan sumber daya pesisir, sehingga berkontribusi signifikan pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada kajian teoritis dan empiris dari penelitian yang relevan selama lima sampai sepuluh tahun terakhir yang menunjukkan hubungan positif antara integrasi sistem akuntansi lingkungan dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam (Balestracci & Nel-lo-andreu, 2025; Bisogno et al., 2025; Huynh & Nguyen, 2024; Sundarasen et al., 2024; Suwarno et al., 2025). Konsep *blue accounting* merupakan pendekatan akuntabilitas lingkungan

yang menekankan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara terukur (Smith, 2018).

Penelitian (Smith, 2018) menunjukkan bahwa *Blue Accounting* mampu meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya perairan melalui data ekologis dan ekonomi. Keterbatasan penelitian sebelumnya muncul pada aspek pentingnya evaluasi penerapan *Blue Accounting* secara komprehensif yang mencakup aspek teknis pencatatan, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi implementasi serta tantangan dan peluang *Blue Accounting* di desa pesisir terluas di Kecamatan Sedati, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, celah penelitian terletak pada belum adanya kajian empiris yang secara komprehensif mengevaluasi penerapan *blue accounting* di desa pesisir dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta mengaitkannya secara eksplisit dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis integrasi *blue accounting* dalam pengelolaan wilayah pesisir Desa Kalanganyar, mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasinya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

#### METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh tentang integrasi *Blue Accounting* dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui metode wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan untuk memantau kondisi fisik lingkungan dan praktik pencatatan, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan data statistik yang relevan. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi pemerintah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan *Blue Accounting*.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemangku kepentingan di Desa Kalanganyar yang meliputi petani tambak, pemerintah desa, akademisi, organisasi lingkungan, dan sektor swasta. Sampel diambil secara *purposive* untuk mendapatkan informan yang memiliki pengetahuan dan peran signifikan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Variabel utama

penelitian meliputi tingkat implementasi *Blue Accounting*, tantangan dan peluang penerapan, serta dampak integrasi *Blue Accounting* terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang diolah dengan sistem skor dan dikombinasikan dengan analisis tematik terhadap data kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik untuk mengelompokkan data ke dalam tema utama ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memahami implementasi *blue accounting* secara komprehensif. Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk mengukur tingkat kesadaran, tantangan, dan dampak integrasi *blue accounting*. Metode ini memungkinkan pemecahan rumusan masalah dan pengujian hipotesis melalui kombinasi data kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi.

Berdasarkan tabel 1 : deskripsi kondisi pesisir, hasil penilaian yang diperoleh, kondisi pesisir di Desa Kalanganyar Sedati menunjukkan skor rata-rata sebesar 1,538. Nilai ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap masalah-masalah yang terjadi di wilayah pesisir, seperti banjir rob, pencemaran, intrusi air asin, hingga serangan hama, serta sebagian dari mereka telah mulai menyebutkan perlunya solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, misalnya melalui pembangunan tanggul, upaya konservasi, atau pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Meskipun demikian, skor ini belum sepenuhnya mencapai nilai 2 yang menggambarkan tingkat kesadaran lebih tinggi, di mana masyarakat tidak hanya memahami masalah tetapi juga secara konsisten mengemukakan solusi yang konkret dan terarah.

Dari sisi kebijakan, desa dapat memanfaatkan hasil ini sebagai dasar untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis pesisir, termasuk integrasi konsep *blue accounting* yang menekankan pada pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan sumber daya secara transparan dan berkelanjutan. Implikasi lebih lanjut adalah mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 tentang ekosistem laut, dengan cara mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga lingkungan, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan konservasi, serta membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang baik tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian alam, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasarkan tabel 2 : deskripsi masalah dan tantangan, hasil penilaian pada aspek Masalah dan Tantangan, diperoleh skor rata-rata sebesar 1,731. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak hanya mampu menyebutkan kendala yang dihadapi dalam aktivitas pesisir, seperti kendala produksi, pencemaran, banjir rob, ataupun hama, tetapi juga mulai memberikan masukan berupa solusi, baik secara teknis maupun dengan menyebutkan peran yang seharusnya diambil oleh pemerintah. Skor ini berada mendekati nilai maksimum (2), yang berarti tingkat kesadaran dan kemampuan responden dalam mengidentifikasi masalah sekaligus

menawarkan solusi sudah relatif baik. Hanya saja, masih terdapat sebagian kecil responden yang berhenti pada penyebutan kendala tanpa memberikan masukan lebih lanjut, sehingga nilai rata-rata belum sepenuhnya mencapai skor ideal.

Temuan ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Kalanganyar sudah berada pada tahap yang cukup maju dalam mengidentifikasi masalah dan tantangan yang mereka hadapi, serta mulai memiliki kesadaran bahwa solusi dapat datang dari upaya teknis di tingkat lokal maupun melalui dukungan pemerintah desa atau daerah. Kondisi ini membuka peluang untuk ditindaklanjuti dengan program pendampingan yang lebih terstruktur, misalnya pelatihan teknis budidaya berkelanjutan, penguatan kelembagaan masyarakat, atau advokasi kebijakan berbasis kebutuhan pesisir. Selain itu, hasil ini juga mendukung penguatan konsep *blue accounting* sebagaimana dijelaskan dalam instrumen kuesioner penelitian.

Berdasarkan tabel 3 : deskripsi *blue accounting*, hasil penilaian pada aspek *blue accounting*, diperoleh skor rata-rata sebesar 0,688. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berada pada tahap awal dalam memahami maupun menerapkan pencatatan hasil usaha tambak atau aktivitas pesisir. Skor ini lebih mendekati angka 1, namun masih berada di bawah kategori “kadang mencatat sederhana atau meyakini sebagian manfaat”, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden belum konsisten melakukan pencatatan, bahkan masih ada yang sama sekali tidak mencatat atau belum mengetahui manfaat dari pencatatan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan dalam kuesioner penelitian yang menanyakan tentang kebiasaan pencatatan hasil panen, biaya, dan pendapatan, di mana banyak responden menjawab masih mengandalkan ingatan atau pencatatan sederhana, serta belum terpapar pada pelatihan pencatatan berbasis sistem

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan *blue accounting* di Desa Kalanganyar Sedati masih berada pada tahap awal dan membutuhkan intervensi yang lebih intensif. Rendahnya skor rata-rata menegaskan bahwa masyarakat memerlukan dukungan berupa pelatihan teknis pencatatan, sosialisasi manfaat pencatatan bagi keberlanjutan usaha, serta fasilitasi penggunaan media pencatatan sederhana maupun digital. Implikasi praktisnya adalah pemerintah desa maupun pihak terkait dapat menjadikan hasil ini sebagai dasar untuk mendorong terbentuknya sistem pencatatan bersama yang lebih transparan, partisipatif, dan terintegrasi. Dengan demikian, *blue accounting* dapat benar-benar berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengelola potensi pesisir secara berkelanjutan, mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya, dan mendukung tujuan konservasi lingkungan pesisir.

Berdasarkan tabel 4 : deskripsi dampak ekonomi, hasil penilaian pada aspek dampak ekonomi, diperoleh skor rata-rata sebesar 1,731. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas

responden menyadari peran penting sektor pesisir, khususnya perikanan, tambak, dan usaha terkait, sebagai sumber utama pendapatan masyarakat. Lebih dari itu, sebagian besar responden juga mulai memahami bahwa pengelolaan ekonomi berbasis pesisir tidak hanya menyangkut pendapatan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Hal ini tercermin dalam skor yang mendekati angka 2, artinya kesadaran ekonomi masyarakat sudah cukup tinggi dan mengarah pada pemahaman pentingnya keberlanjutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan kuesioner penelitian yang menanyakan kontribusi sektor perikanan dan tambak terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana sebagian besar responden mengakui adanya manfaat ekonomi langsung serta peluang keberlanjutan jika dikelola dengan baik

Temuan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat pesisir Desa Kalanganyar sudah cukup matang dalam menilai dampak ekonomi dari aktivitas pesisir. Mereka tidak hanya melihat tambak, perikanan, dan usaha pesisir sebagai penopang ekonomi sehari-hari, tetapi juga mulai mengaitkannya dengan keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Hal ini penting karena memberikan landasan kuat untuk program pembangunan pesisir yang berorientasi pada keberlanjutan, misalnya dengan memperkenalkan praktik budidaya ramah lingkungan, rotasi tambak, atau diversifikasi usaha berbasis pesisir. Dari sisi kebijakan, hasil ini dapat menjadi masukan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga harus menekankan pada aspek keberlanjutan ekonomi antar-generasi agar manfaat pesisir dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Berdasarkan tabel 5 : deskripsi dampak sosial, hasil penilaian pada aspek Dampak Sosial, diperoleh skor rata-rata sebesar 1,247. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih berada pada kategori menengah, cenderung rendah. Artinya, masyarakat sudah mulai menunjukkan adanya kepedulian dan keterlibatan, namun partisipasi yang muncul masih terbatas pada sebagian kelompok saja, belum melibatkan seluruh elemen masyarakat secara luas. Dengan kata lain, kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan pesisir secara berkelanjutan masih dalam tahap berkembang dan membutuhkan dorongan lebih kuat agar bisa mencapai tingkat partisipasi yang lebih menyeluruh.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kesadaran sosial sudah mulai tumbuh, tetapi masih perlu diperkuat melalui program sosialisasi, pendidikan lingkungan, dan pembentukan kelompok masyarakat yang lebih terorganisir. Implikasinya, pemerintah desa maupun lembaga terkait perlu mendorong keterlibatan yang lebih luas, baik melalui pelatihan, forum musyawarah, maupun pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, diharapkan partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada segelintir individu, melainkan menjadi gerakan bersama yang lebih inklusif. Upaya ini akan mendukung pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait dengan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga dampak sosial dari program pesisir dapat lebih dirasakan oleh seluruh warga desa.

Berdasarkan tabel 6 : deksripsi dampak lingkungan, hasil penilaian pada aspek Dampak Lingkungan, diperoleh skor rata-rata sebesar 1,086. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, termasuk penerapan konsep *blue accounting*, dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan, namun pemanfaatan tersebut sangat bergantung pada adanya dukungan dari pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat sendiri dapat berperan signifikan dalam konservasi dan pencegahan pencemaran, melainkan masih menunggu adanya fasilitasi, kebijakan, maupun dukungan nyata dari pihak eksternal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesadaran awal, tetapi belum berkembang menjadi keyakinan kolektif bahwa inisiatif masyarakat bisa menjadi kekuatan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa kepedulian masyarakat terhadap dampak lingkungan sudah mulai tumbuh, tetapi masih bersifat parsial dan sangat tergantung pada peran pemerintah. Implikasinya, untuk memperkuat aspek lingkungan dalam pengelolaan pesisir, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih terstruktur antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal. Program konservasi berbasis komunitas, pelatihan teknis tentang pencegahan pencemaran, serta integrasi data lingkungan melalui sistem *blue accounting* dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pengelolaan lingkungan pesisir tidak hanya bermanfaat, tetapi juga sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, nilai rata-rata 1,086 ini dapat dipandang sebagai titik awal menuju peningkatan kesadaran ekologis, yang apabila diperkuat dengan dukungan kebijakan dan partisipasi aktif masyarakat, berpotensi berkembang menjadi keyakinan kolektif terhadap pentingnya konservasi jangka panjang.

Berdasarkan tabel 7 : deskripsi pembangunan berkelanjutan, hasil penilaian pada aspek pembangunan berkelanjutan (SDGs), diperoleh skor rata-rata sebesar 1,538. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Mayoritas masyarakat tidak hanya pernah mendengar istilah tersebut, tetapi juga mulai memahami sebagian maknanya, misalnya terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan pesisir, kelestarian tambak, serta keberlangsungan hidup generasi mendatang. Namun, nilai rata-rata ini masih berada di antara kategori “paham sebagian” dan “memahami penuh,” yang berarti pemahaman responden belum sepenuhnya mendalam atau konsisten. Kesadaran kolektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

sudah cukup kuat, tetapi masih memerlukan penguatan terutama dalam penerapan nyata pada kehidupan sehari-hari.

Hasil ini juga sejalan dengan temuan kuesioner penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung gagasan menjaga tambak, mangrove, dan laut agar tetap bermanfaat bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk anak cucu di masa depan. Responden juga cenderung menyetujui adanya aturan bersama atau kerjasama warga untuk menjaga lingkungan, meskipun bentuk implementasinya masih memerlukan pendampingan.

Hasil penilaian ini memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Kalanganyar Sedati sudah berada pada tahap transisi menuju pemahaman penuh mengenai pembangunan berkelanjutan. Implikasinya, diperlukan upaya lanjutan berupa edukasi, sosialisasi, serta integrasi konsep SDGs dalam program desa agar pemahaman ini bisa berkembang menjadi tindakan nyata. Dengan memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diwujudkan sebagai praktik kolektif yang mendukung kesejahteraan saat ini sekaligus menjamin keberlangsungan generasi mendatang.

Implementasi *blue accounting* di Desa Kalanganyar Sedati masih dalam tahap awal dengan skor rata-rata 0,688, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden belum melakukan pencatatan hasil usaha tambak dan aktivitas pesisir secara sistematis. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya pemahaman dan praktik pencatatan sumber daya laut dan pesisir dalam komunitas tersebut. *Blue accounting* sendiri adalah suatu pendekatan yang mengkombinasikan pelaporan keuangan dan non-keuangan yang fokus pada keberlanjutan sumber daya laut, bertujuan memberikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya laut (Syah et al., 2020).

Menurut teori akuntansi lingkungan (Bisogno et al., 2025), pencatatan sistematis dan pelaporan aktivitas yang berkelanjutan sangat penting untuk memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara efektif. Penelitian Stefannie & Khairin (2025) menunjukkan bahwa pelatihan teknis pencatatan dan sosialisasi manfaat *blue accounting* meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Oleh karena itu, intervensi berupa pelatihan teknis, sosialisasi manfaat, dan penggunaan media pencatatan (baik tradisional maupun digital) sangat dibutuhkan untuk memperkuat implementasi *blue accounting* di Desa Kalanganyar Sedati. Media pencatatan digital, seperti aplikasi berbasis smartphone, telah terbukti efektif dalam memperbaiki akurasi dan kemudahan akses data (Husnita et al., 2023).

Dengan pendekatan ini, *blue accounting* dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya pesisir, mengurangi potensi konflik antar

pengguna sumber daya, dan memfasilitasi pelestarian lingkungan (Failler et al., 2023). Sistem pencatatan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah desa dan komunitas dalam memantau dinamika sumber daya dan menyesuaikan kebijakan pengelolaan berbasis data terbaru.

Sebagian besar responden mampu mengidentifikasi berbagai kendala di wilayah pesisir seperti pencemaran, banjir rob, intrusi air asin, dan serangan hama, serta memberikan masukan teknis dan peran pemerintah dengan skor rata-rata 1,731. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang cukup baik namun masih terdapat gap dalam pengembangan solusi yang lebih terperinci dan implementatif.

Menurut pendekatan teori partisipasi sosial (Chi et al., 2014), kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan merupakan tahap awal yang penting tetapi belum cukup tanpa adanya kapasitas dan dukungan kelembagaan yang memadai. Penelitian Stover et al. (2024) menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat dan advokasi berbasis komunitas agar solusi teknis dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif.

Peluang pengembangan *blue accounting* sangat besar, terutama melalui program pelatihan teknis yang fokus pada metode pencatatan dan analisis data lingkungan pesisir, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan komunitas. Selain itu, advokasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal akan memastikan integrasi program lebih partisipatif dan kontekstual (Rafita et al., 2025).

Dengan pendekatan ini, *blue accounting* tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan tapi juga sebagai instrumen pengelolaan sumber daya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan kesadaran kolektif, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dan kebutuhan komunitas pesisir.

Masyarakat Desa Kalanganyar Sedati telah menunjukkan kesadaran cukup terhadap pembangunan berkelanjutan dengan skor rata-rata 1,538, yang mencerminkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan pesisir harus memperhatikan kelestarian sumber daya bagi generasi mendatang. Namun, pemahaman ini masih dalam tahap transisi dan perlu diperkuat melalui edukasi berkelanjutan dan integrasi konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dalam program desa.

Menurut teori pembangunan berkelanjutan (Mensah, 2019), pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi fondasi utama untuk mempertahankan sumber daya alam jangka panjang. Penelitian Wulandari et al. (2025) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat melalui akuntabilitas dan transparansi pencatatan sumber daya (seperti *blue accounting*) dapat mendorong tata kelola yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan implementasi SDGs.

Integrasi *blue accounting* dalam pengelolaan wilayah pesisir membawa dampak positif dalam beberapa aspek: transparansi pengelolaan sumber daya meningkat, partisipasi aktif masyarakat bertambah, dan tata kelola ekonomi, sosial, serta lingkungan menjadi lebih terstruktur dan menyeluruh (Anwar et al., 2023). Ini membuka peluang bagi Desa Kalanganyar Sedati untuk menjadi model pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sosial.

### KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang mengkaji penerapan *blue accounting* di wilayah pesisir Desa Kalanganyar Sedati, dapat disimpulkan bahwa penerapan *blue accounting* masih berada pada tahap awal dan memerlukan intervensi berupa pelatihan teknis, sosialisasi, serta fasilitasi penggunaan media pencatatan untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Integrasi *blue accounting* berperan penting dalam meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, sehingga berdampak positif pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir tersebut.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan responden yang terbatas serta fokus pada persepsi tanpa pengamatan langsung terhadap praktik pencatatan, sehingga hasil harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Saran penelitian ke depan adalah memperluas cakupan sampel dan menggabungkan metode pengamatan lapangan untuk menggali praktik pencatatan secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dan kebijakan pendukung guna meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir secara partisipatif dan berkelanjutan.

### Penghargaan/Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada : Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Narotama yang telah memberikan dukungan pendanaan serta fasilitas penelitian. Mitra Kantor Kepala Desa Kalanganyar yang bersedia menjadi objek penelitian dengan memberikan data, masukan, serta partisipasi aktif selama proses pengumpulan data. Tim peneliti dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini, atas kerjasamanya, komitmen, dan kontribusinya sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan serta seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. S., Ruhtiani, M., & Hendriana, R. (2023). Blue Carbon: Integrative Management of Coastal Ecosystems Based on Regional Autonomy. *Jambe Law Journal*, 6(2), 185–204. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.2.185-204>
- Areia, N. P., Tavares, A. O., & Costa, P. J. M. (2023). Public perception and preferences for coastal risk management: Evidence from a convergent parallel mixed-methods study.

- Science of the Total Environment, 882(January), 163440. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163440>
- Arumugam, M., Jayaraman, S., Sridhar, A., Venkatasamy, V., Brown, P. B., Abdul Kari, Z., Tellez-Isaias, G., & Ramasamy, T. (2023). Recent Advances in Tilapia Production for Sustainable Developments in Indian Aquaculture and Its Economic Benefits. *Fishes*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/fishes8040176>
- Balestracci, G., & Nel-lo-andreu, M. G. (2025). Coastal , marine or blue tourism governance ? Spotting academic trends through a bibliometric analysis. *Frontier in Marine Science*, 12(10), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1623424>
- Bisogno, M., Abate, F., & Citro, F. (2025). Environmental and sustainability accounting, budgeting and reporting: a structured literature review. *Journal of Accounting Literature*, 47(5), 270–299. <https://doi.org/10.1108/JAL-06-2024-0135>
- Chi, C. S. F., Xu, J., & Xue, L. (2014). Public participation in environmental impact assessment for public projects: A case of non-participation. *Journal of Environmental Planning and Management*, 57(9), 1422–1440. <https://doi.org/10.1080/09640568.2013.810550>
- Choronawati, A. I., Prayitno, S. B., & Haeruddin, . (2019). Studi Kelayakan Budidaya Tambak Di Lahan Pesisir Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 11(1), 191–204. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i1.22522>
- Failler, P., Liu, J., Lallemand, P., & March, A. (2023). *Blue Accounting* Approaches in the Emerging African Blue Economy Context. *Journal of Sustainability Research*, 5(1), 1–25. <https://doi.org/10.20900/jsr20230002>
- Husnita, L., Rahayuni, A., Fusfitasari, Y., Siswanto, E., & Rintaningrum, R. (2023). The Role of Mobile Technology in Improving Accessibility and Quality of Learning. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 259–271. <https://doi.org/10.31958/jaf.v11i2.10548>
- Huynh, Q. L., & Nguyen, V. K. (2024). The Role of Environmental Management Accounting in Sustainability. *Sustainability*, 16(17), 7440.
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Napitupulu, L., Tanaya Sitanggang, S., Ayostina, I., Andesta, I., Fitriana, R., Ayunda, D., Tussadiah, A., Ervita, K., Makhas, K., Firmansyah, R., & Haryanto, R. (2022). Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A Review. *World Resources Institute Indonesia*. <https://doi.org/10.46830/wrirpt.20.00064>
- Ottinger, M., Clauss, K., & Kuenzer, C. (2018). Opportunities and challenges for the estimation of aquaculture production based on earth observation data. *Remote Sensing*, 10(7), 1–24. <https://doi.org/10.3390/rs10071076>
- Rafita, A., Ningrum, S., & Sukarno, D. (2025). Policy Advocacy for Disaster Risk Reduction Integration in Regional Spatial Planning : Lessons from Purwakarta. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(3), 719–730.
- Rahmayanti, A. Y., & Sari, D. K. (2022). *Blue Accounting* to Enhance the Quality of Sustainability Report. *Proceedings*, 83(69), 1–5. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083069>
- Smith, J. (2018). Natural capital accounting and environmental sustainability: Implications for policy and governance. *Journal of Environmental Accounting and Management*, 6(2), 89–104
- Stefannie, D., & Khairin, F. N. (2025). Open Access *Blue Accounting* Practices for Marine Economic Sustainability : A Descriptive Analysis of the Implementation of *Blue Accounting* in the Fisheries Sector in West Kutai Regency. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 9(6), 218–225.
- Stover, J., Avadhanula, L., & Sood, S. (2024). A review of strategies and levels of community engagement in strengths-based and needs-based health communication interventions. *Frontiers in Public Health*, 12(4), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1231827>

- Sundarasan, S., Rajagopalan, U., & Alsmady, A. A. (2024). Environmental Accounting and Sustainability: A Meta-Synthesis. *Sustainability* (Switzerland), 16(21), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su16219341>
- Suwarno, T. E., Laoli, V., & Simorangkir, E. N. (2025). Akuntansi Biru Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Maritim Untuk Indonesia Emas 2045. *JMA*, 3(8), 1–10. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2724>
- Syah, S., Saraswati, E., Sukoharsono, E. G., & Roekhudin. (2020). *Blue Accounting* and Sustainability. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 144, 502–508. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200606.085>
- UN. (2017). The Potential of the Blue Economy, Increasing Long Term Benefit of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Country. International Bank for Reconstruction and Development. <https://doi.org/10.1596/26843>
- Wulandari, E., Sitoresmi, M. W., Atika, A., Manurung, H., Sunaningsih, S. N., & Arifah, S. (2025). Accountability of SDGs in Local Governments: Case Study of Central Java and Yogyakarta. *Accounting Analysis Journal*, 13(3), 208–216. <https://doi.org/10.15294/aaj.v13i3.16748>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

### TABEL

Tabel 1. Deskripsi Kondisi Pesisir

Tema	Penilai	Hasil Penilaian
Kondisi Pesisir	1	1,581
	2	1,516
	3	1,516
	Rata-rata	1,538

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2. Deskripsi Masalah dan Tantangan

Tema	Penilai	Hasil Penilaian
Masalah & Tantangan	1	1,774
	2	1,742
	3	1,677
	Rata-rata	1,731

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 3. Deskripsi *Blue Accounting*

Tema	Penilai	Hasil Penilaian
<i>Blue Accounting</i>	1	0,419
	2	0,645
	3	1,000
	Rata-rata	0,688

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 4. Deskripsi Dampak Ekonomi

Tema	Penilai	Hasil Penilaian
Dampak Ekonomi	1	1,677
	2	1,774
	3	1,742
	Rata-rata	1,731

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 5. Deskripsi Dampak Sosial

Tema	Penilai	Hasil Penilaian
Dampak Sosial	1	1,226
	2	1,290
	3	1,226
	Rata-rata	1,247

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 6. Deskripsi Dampak Lingkungan

Tema	Penilai	Hasil Penilaian
Dampak Lingkungan	1	1,032
	2	1,129
	3	1,097
	Rata-rata	1,086

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 7. Deskripsi Pembangunan Berkelanjutan

Tema	Penilai	Hasil Penilaian
Pembangunan Berkelanjutan	1	1,581
	2	1,548
	3	1,484
	Rata-rata	1,538

Sumber: Data diolah, 2025